

**KOLABORASI BPBD
DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH**

Agnes Andrea Damayanti

NPP 31.0420

Asdaf Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: agnes.andrea60@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dra. Nunung Royani, MM

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (GAP): The researcher focuses on the problem of forest and land fire management that is prone to occur in Magelang District, especially during the dry season. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the collaboration of BPBD in forest and land fire management in Magelang district. **Methods:** This study used descriptive qualitative method and analysis according to collaboration theory from Ansell and Gash (2007). Data were collected through observation, documentation, and semi-structured interviews. **Results/Findings:** The findings obtained by the researchers in this study are that collaboration in forest and land fire management has been well established in the form of coordination meetings to anticipate dry season disasters and forest and land fire alert apples. However, in the implementation of collaboration there are obstacles including limited funds, locations that are far and difficult to reach and lack of public awareness and knowledge in terms of forest and land fires. So efforts are made in the form of socialization to the community, cooperation between BPBD and the business world regarding limited funds, and efforts to carry out forest and land fire preparedness apples regularly. **Conclusion:** Collaboration is classified as running well, implementation is classified as good, although it is still constrained by limited facilities and infrastructure, funds, and low community knowledge.

Keyword: Collaboration, Mitigation, Forest and Land Fires

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Fokus peneliti ada pada permasalahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang rawan terjadi di Kabupaten Magelang, terutama pada musim kemarau. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kolaborasi BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Magelang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis menurut teori kolaborasi dari Ansell dan Gash (2007). Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara semi terstruktur. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini yaitu kolaborasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan telah terjalin baik dalam bentuk rapat koordinasi antisipasi bencana musim kemarau dan apel siaga

kebakaran hutan dan lahan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kolaborasi terdapat kendala diantaranya keterbatasan dana, lokasi yang jauh dan sulit dijangkau serta kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang kurang dalam hal kebakaran hutan dan lahan. Maka dilakukan upaya berupa sosialisasi kepada masyarakat, kerja sama BPBD dengan pihak dunia usaha terkait keterbatasan dana, dan berupaya untuk melakukan apel siaga kebakaran hutan dan lahan secara rutin. **Kesimpulan:** Kolaborasi tergolong berjalan dengan baik, pada pelaksanaan tergolong baik, meskipun masih terkendala dengan keterbatasan sarana dan prasarana, dana, serta pengetahuan masyarakat yang rendah.

Kata kunci: Kolaborasi, Penanggulangan, Kebakaran Hutan dan Lahan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenvh) total luas kawasan hutan di Indonesia mencapai 125,76 juta hektare (ha) pada 2022. Angka tersebut setara dengan 62,97% dari luas daratan Indonesia yang sebesar 191,36 juta ha. Hutan di Indonesia yang berbentuk daratan seluas 120,47 juta ha sedangkan kawasan hutan perairan seluas 5,32 juta ha.

Namun, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), luas hutan Indonesia sudah berkurang 956.258 hektare (ha) selama periode 2017-2021. Angka tersebut setara dengan 0,5% dari total luas daratan Indonesia. Salah satu penyebab fenomena hilangnya hutan di Indonesia adalah disebabkan oleh kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia merupakan permasalahan yang rutin terjadi setiap tahun khususnya pada musim kemarau. Kebakaran hutan merupakan bencana yang pada umumnya disebabkan oleh ulah manusia (99%), baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Perbuatan manusia yang disengaja yaitu pada saat mereka melakukan penyiapan lahan untuk perladangan, pertanian, dan perkebunan dengan cara membakar karena mudah, murah, dan cepat.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki status potensi bahaya tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat terlihat pada tabel potensi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Tengah di bawah ini

No	Bahaya					Kelas
	Luas (Ha)					
	Kabupaten/Kota	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
01	CILACAP	34.525	27.344	6.194	68.063	TINGGI
02	BANYUMAS	26.095	11.636	167	37.897	SEDANG
03	PURBALINGGA	10.740	8.313	3.318	22.371	SEDANG
04	BANJARNEGARA	25.194	28.886	324	54.404	SEDANG
05	KEBUMEN	8.650	21.939	1	30.590	SEDANG
06	PURWOREJO	20.974	18.373	0	39.347	SEDANG
07	WONOSOBO	16.780	29.698	4.563	51.041	SEDANG
08	MAGELANG	7.824	16.346	3.551	27.722	TINGGI
09	BOYOLALI	3.680	14.800	2.924	21.403	SEDANG
10	KLATEN	2.304	350	582	3.236	RENDAH
11	SUKOHARJO	869	412	0	1.281	SEDANG
12	WONOGIRI	38.079	5.753	2.463	46.295	TINGGI
13	KARANGANYAR	2.757	6.720	4.870	14.346	TINGGI
14	SRAGEN	1.399	3.658	0	5.057	SEDANG
15	GROBOGAN	511	41.036	11.426	52.972	TINGGI
16	BLORA	250	44.275	30.332	74.857	TINGGI

17	REMBANG	4.391	16.414	4.552	25.357	TINGGI
18	PATI	10.979	22.652	2.466	36.096	SEDANG
19	KUDUS	3.447	2.787	693	6.927	SEDANG
20	JEPARA	6.105	15.467	6.947	28.519	TINGGI
21	DEMAK	133	2.053	808	2.993	SEDANG
22	SEMARANG	6.069	22.459	1.802	30.330	SEDANG
23	TEMANGGUNG	3.256	35.617	3.385	42.258	SEDANG
24	KENDAL	7.506	32.838	2.172	42.515	SEDANG
25	BATANG	9.433	20.338	4.689	34.460	SEDANG
26	PEKALONGAN	6.620	27.759	1.992	36.371	SEDANG
27	PEMALANG	13.428	22.669	2.602	38.700	TINGGI
28	TEGAL	8.753	10.142	1.730	20.625	TINGGI
29	BREBES	20.065	35.488	5.581	61.135	SEDANG
Kota						
01	KOTA MAGELANG	43	0	0	43	RENDAH
02	KOTA SALATIGA	266	224	0	490	SEDANG
03	KOTA SEMARANG	3.314	2.315	0	5.629	SEDANG

Wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang memiliki bentuk seperti cekungan yang dikelilingi beberapa gunung (Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing) dan pegunungan Menoreh. Luas wilayah Kabupaten Magelang dengan status rendah adalah 7.824 ha, status sedang 16.346 ha, dan status tinggi 3.551 ha dengan total luas wilayah potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan sebesar 27.722 ha. Oleh karena itu, peneliti berniat untuk melakukan penelitian mengenai penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dalam aspek kolaborasi antar pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan upaya pemerintah daerah yang tidak dapat berjalan sendiri melainkan harus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait dan melibatkan masyarakat untuk membantu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi apabila curah hujan yang sangat sedikit yang biasa terjadi pada musim kemarau panjang sehingga menyebabkan timbulnya titik-titik panas (hotspot). Penanggulangan bencana tidak hanya serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi atau pemulihan kembali infrastruktur serta aktivitas masyarakat baik sosial, pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Pemerintah daerah dalam melakukan upaya penanggulangan bencana sendiri membutuhkan bantuan dari masyarakat dan pihak lainnya. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah yang diadakan dalam penanggulangan bencana hanyalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dimana BPBD sendiri masih kekurangan sumber daya baik kapasitas sumber daya manusia yang terbatas ataupun fasilitas penunjang penanggulangan bencana yang dinilai masih kurang memadai. Maka dari itu, masyarakat memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan agar nantinya tercipta masyarakat yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk menghadapi masalah di masa yang akan datang. Kemudian, diperlukan peran dari media massa dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran dan lahan untuk

melakukan sosialisasi secara daring upaya penanggulangan dan berita mengenai potensi maupun peristiwa kebakaran yang terjadi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu sebagai karya ilmiah guna bahan perbandingan sekaligus pedoman peneliti. Penelitian Dwi Agustina berjudul Kolaborasi Antara Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DIY dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta (2017), menemukan bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyadari bahwa perlu melibatkan multi stakeholder dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penelitian Yumantoko (2019) berjudul Kolaborasi Para Pihak Dalam Penanganan Destinasi Wisata Terdampak Bencana di Taman Nasional Gunung Rinjani, menjelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi memiliki peran masing-masing dari setiap tahap mulai dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Penelitian Heru Rochmansjah (2022) berjudul *Collaborative Governance* Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bandung, menemukan bahwa *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung belum berjalan secara efektif, terutama pada dimensi *collaboration dynamic*. Hal ini dapat dilihat dengan dominannya unsur pemerintah dalam perencanaan, perumusan dan penetapan program dan kegiatan. Adanya peraturan tentang satuan pelaksana penanggulangan bencana juga belum terimplementasikan secara optimal sehingga para stakeholder cenderung melaksanakan kegiatannya secara individual. Akibatnya masih banyak titik rawan banjir di Kota Bandung. Diketahui pula bahwa model *collaborative governance* penanggulangan banjir yang berlangsung di Kota Bandung menempatkan pemerintah sebagai stakeholder utama sekaligus driver. Penelitian Pradana (2018), yang membahas tentang Efektivitas Penanggulangan Risiko Bencana Alam Melalui Pendekatan Kolaboratif di Desa Wukirsari Kabupaten Bantul menemukan bahwa penanggulangan risiko bencana secara kolaboratif di Desa Wukirsari berjalan efektif pada aspek legislasi, kelembagaan, pembiayaan, tanggap darurat dan pemulihan. Efektivitas tersebut dipengaruhi oleh faktor modal sosial berupa kegotongroyongan dan pendayagunaan organisasi sosial, serta faktor peran kepemimpinan yang mendukung kolaborasi aktor masyarakat dan pakar. Penelitian dari Asmidin (2022) yang berjudul Kolaborasi Triple Helix dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Buton, menjelaskan bahwa minimnya tingkat koordinasi dan inovasi yang terjalin pada elemen triple helix sehingga tidak tercipta satu integrasi yang membuat upaya mitigasi terkesan lamban, kemudian antar elemen triple helix ini memiliki ideologi yang berbeda, dan ideologi ini yang terkadang ditonjolkan oleh masing-masing elemen helix. Penelitian oleh Arfani (2022) yang menganalisis tentang Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Pada Destinasi Wisata Di Desa Kalanganyar Sidoarjo, menemukan bahwa kolaborasi melibatkan sistem, subsistem, sektor, dan juga dimensi sehingga tercipta orkestrasi yang terintegrasi secara optimal baik peran *Bussiness, Government, Community, Academic, Dan Media (BGCAM)* yang dikenal dengan Konsep Penta Helix. Kolaborasi pentahelix dalam mengurangi risiko bencana pada destinasi wisata baik untuk wisata desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo termasuk daerah rawan bencana kategori sedang menurut data dari Indek Risiko Bencana Indonesia tahun 2020, seperti bencana

alam dan bencana non alam yang terjadi. Penelitian Tri Maylani, Dadang Masyur (2019) yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut, menemukan bahwa *collaborative governance* dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis belum maksimal. Ada beberapa indikator yang belum maksimal, yaitu: tujuan, kompromi dan komunikasi, sementara demokrasi dan kesetaraan; kekuatan dan kepercayaan; dan tekad, komitmen dan stamina telah berjalan dengan baik. Penelitian Herlina Wahyu Tri Widyaningsih (2020) berjudul *Manajemen Kolaboratif Dalam Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Banjarnegara*, menjelaskan manajemen kolaboratif di Kabupaten Banjarnegara secara keseluruhan belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien namun dapat dikatakan cukup baik. Faktor pendukung manajemen kolaboratif penanggulangan bencana di Kabupaten Banjarnegara adalah adanya komunikasi, komitmen dan saling memahami diantara para stakeholder yang direalisasikan dengan kerjasama dan kesadaran dari semua elemen yang sadar akan tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya penanggulangan bencana. Penelitian Hendra Irawan Umabaihi, Nurliah Nurdin, Romli Arsyad (2022) yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula*, menemukan bahwa *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula yang peneliti amati bahwa proses kolaborasi terjadi dalam 3 tahap, yaitu 1). Tahap pra bencana, 2). Tahap tanggap darurat, 3). Tahap pasca bencana belum berjalan dengan maksimal, hal ini dilihat dari belum dilibatkannya pemangku kepentingan/aktor yang lain dalam berkolaborasi, yaitu akademisi atau perguruan tinggi. Kurangnya sumber daya dari sisi anggaran maupun peralatan mengakibatkan penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula berjalan tidak maksimal, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya alat berat (Eksavator) untuk melakukan normalisasi dan minimnya anggaran penanggulangan bencana untuk pembuatan tanggul. Penelitian Teddy Rusmawan, Supardi Hamid, Joko Santoso (2023) yang berjudul *Proses Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*, menemukan bahwa proses *collaborative governance* dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga menjadi agenda prioritas bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk bersama-sama bersinergi mengurangi resiko bencana alam yang terjadi dari berbagai aspek dan mencegah bencana alam secara berkelanjutan. Dalam proses kolaboratif yang dilakukan sudah berjalan dengan skema rencana yang diterapkan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda daripada penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada hubungan kolaborasi yang dijalin BPBD dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan yang masih rawan terjadi di daerah Kabupaten Magelang. Kemudian pada penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian yaitu kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan sehingga perangkat daerah yang menjadi sumber data untuk memenuhi penelitian ini ialah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga Taman Nasional Gunung Merapi

(TNGM). Peneliti ingin mengamati hubungan kolaborasi yang terbentuk antara perangkat daerah terkait dengan kelompok masyarakat dan media massa.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kolaborasi BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Magelang, kendala/hambatan dalam pelaksanaan kolaborasi dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana data yang disajikan dalam bentuk narasi. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Magelang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Satuan Polisi Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, Koordinator Lapangan UPT Pemadam Kebakaran Magelang, staf Balai Taman Nasional Gunung Merapi, dan anggota Masyarakat Peduli Api (MPA). Adapun analisisnya menggunakan teori kolaborasi yang digagas oleh Ansell dan Gash (2007) yang menyatakan bahwa memiliki lima dimensi yaitu dialog antar muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan dampak sementara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kolaborasi BPBD dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Peneliti menganalisis kolaborasi BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Magelang menggunakan teori Ansell dan Gash (2007) yang menyatakan bahwa kolaborasi dapat dikupas melalui lima dimensi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1.1 Dialog tatap muka dalam proses kolaborasi

Dialog tatap muka antar pihak yang terlibat dalam kolaborasi sangat penting karena dengan dialog antar muka dapat mempermudah para pihak untuk saling memahami satu sama lain. Dalam kolaborasi BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan rapat koordinasi yang dilakukan rutin setiap tahun pada saat persiapan antisipasi bencana pada musim kemarau dan musim hujan serta apel siaga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, namun pelaksanaan apel siaga sendiri belum menjadi agenda rutin.

3.1.2 Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi

Kepercayaan merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam kolaborasi karena semakin tinggi rasa percaya antar pihak maka semakin tinggi tingkat keberhasilan kolaborasi. Dalam hal ini BPBD terbuka mengenai kekurangan/kendala yang dimiliki seperti sarana dan prasarana dan keterbatasan dana sehingga setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi dapat saling membantu untuk mengatasi kendala tersebut.

3.1.3 Komitmen pada proses kolaborasi

Komitmen berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai melalui misi yang dijalankan melalui kolaborasi, seperti BPBD dengan pihak yang terlibat diantaranya dinas perhubungan, diskominfo, UPT pemadam kebakaran, Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Masyarakat Peduli Api, dan juga pihak dunia usaha yang memiliki misi kolaborasi yaitu untuk melakukan penanggulangan

kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Magelang dengan saling bekerja sama dan saling membantu.

3.1.4 Pemahaman bersama dalam proses kolaborasi

Dengan memiliki tujuan yang sama membuat para pihak akan memiliki kesepakatan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kolaborasi BPBD memiliki tujuan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan agar jangan sampai disepelekan. Oleh karena itu, setiap pihak sepakat untuk selalu melakukan koordinasi untuk pencegahan maupun penanganan kebakaran hutan dan lahan meskipun belum ada SK anggota satgas kebakaran hutan lahan.

3.1.5 Dampak sementara

Terdapat beberapa hasil dari kolaborasi yang dilakukan yaitu kolaborasi dalam tahap pencegahan yang melibatkan seluruh pihak tersebut, seperti adanya dilaksanakan rapat koordinasi antisipasi bencana pada musim kemarau, apel kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana kebakaran, dan sosialisasi. Selain itu, setiap pihak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing secara maksimal sehingga dapat saling mem-backup ketika dibutuhkan. Akan tetapi, hasil dari kolaborasi BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum terlihat sepenuhnya karena keterbatasan waktu penelitian.

3.2 Hambatan dari Kolaborasi BPBD dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Hambatan yang terdapat dalam kolaborasi BPBD dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah berkaitan dengan luas wilayah dan kondisi lokasi yang memiliki akses yang sulit dilalui dan lokasi yang curam, pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang terkait dengan bahaya dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, belum rutin dilakukan apel siaga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta keterbatasan dana. Belum adanya Surat Keputusan anggota Satuan Tugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

3.3 Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Kolaborasi BPBD dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada diantaranya dengan memperlengkapi sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta melakukan pelatihan, simulasi, dan sosialisasi kepada anggota Masyarakat Peduli Api. Kemudian, untuk mengatasi keterbatasan dana dilakukan kerja sama antara BPBD dengan dunia usaha yaitu BRI dan TWC yang berguna untuk pembelian sarana dan prasarana, BBM, dan operasional penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. BPBD juga sedang berupaya agar apel siaga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat secara rutin dilakukan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kolaborasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terjadi didasarkan atas penanggulangan bencana yang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak dan membutuhkan bantuan serta kerjasama dari pihak yang lain. Peneliti menemukan temuan penting dimana kolaborasi dapat berjalan dengan baik ketika para pihak yang terlibat dalam kolaborasi memahami dan menjalankan perannya dengan baik. Sama halnya dengan temuan dari Yumantoko (2019) menjelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi memiliki peran masing-masing dari setiap tahap mulai dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Dalam proses kolaborasi masih terdapat kendala atau hambatan yang mengakibatkan kolaborasi belum berjalan maksimal. Sama halnya dengan temuan penelitian Hendra Irawan Umabaihi, Nurliah Nurdin, Romli Arsyad (2022), menemukan bahwa *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula belum berjalan dengan maksimal, hal ini dilihat dari belum dilibatkannya pemangku kepentingan/ aktor yang lain dalam berkolaborasi, yaitu akademisi atau perguruan tinggi. Kurangnya sumber daya dari sisi anggaran maupun peralatan mengakibatkan penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula berjalan tidak maksimal, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya alat berat (eksavator) untuk melakukan normalisasi dan minimnya anggaran penanggulangan bencana untuk pembuatan tanggul.

IV. KESIMPULAN

Kolaborasi BPBD telah ditemukan berjalan di Kabupaten Magelang yaitu dalam hal penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Kolaborasi BPBD itu telah melibatkan perangkat daerah dalam hal ini ada dinas perhubungan, diskominfo, UPT pemadam kebakaran, Balai Taman Nasional Gunung Merapi, kemudian juga melibatkan BUMN seperti BRI dan Taman Wisata Candi (TWC), dan ada juga melibatkan kelompok masyarakat, dalam hal ini adalah Masyarakat Peduli Api. Akan tetapi, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kolaborasi berkaitan dengan luas wilayah dan kondisi lokasi yang memiliki akses yang sulit dilalui dan lokasi yang curam, pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang terkait dengan bahaya dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta keterbatasan sarana prasarana dan dana. Untuk mengatasi kendala yang ada, dilakukan upaya diantaranya dengan memperlengkapi sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta melakukan pelatihan, simulasi, dan sosialisasi kepada anggota Masyarakat Peduli Api. Kemudian, untuk mengatasi keterbatasan dana dilakukan kerja sama antara BPBD dengan dunia usaha yaitu BRI dan TWC yang berguna untuk pembelian sarana dan prasarana, BBM, dan operasional penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dan biaya penelitian. Dengan adanya keterbatasan ini, peneliti tidak dapat melakukan wawancara dengan informan yang jumlahnya lebih banyak dan tidak dapat ikut serta dalam penanggulangan apabila ada terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Magelang.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi penelitian serupa berkaitan dengan kolaborasi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Magelang.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ditunjukkan kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Magelang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk melakukan penelitian, masyarakat, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Dwi. (2017). Kolaborasi Antara Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DIY

dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 9 No 01
<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/87>

Simangunsong, Fernandes. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.

Rochmansjah, H. (2022). Collaborative Governance Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bandung. Jurnal, Universitas Pasundan, Bandung
<http://repository.unpas.ac.id/57878/>

Yumantoko. (2019). Kolaborasi Para Pihak Dalam Penanganan Destinasi Wisata Terdampak Bencana Di Taman Nasional Gunung Rinjani. Jurnal Penelitian Kehutanan Vol. 3 No.1 April 2019: 15-28
https://www.researchgate.net/publication/332777021_Kolaborasi_Para_Pihak_Dalam_Penanganan_Destinasi_Wisata_Terdampak_Bencana_Di_Taman_Nasional_Gunung_Rinjani

Arfani, M. (2022). Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada Destinasi Wisata Di Desa Kalanganyar Sidoarjo. Jurnal Syntax Transformation, 3(1), 106-120.
<https://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/497>

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.

Asmidin, Sadat, A.A.A (2022). Kolaborasi Triple Helix Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Buton. Jurnal Manajemen Bencana Vol. 8 No. 1, 71-82.
https://www.researchgate.net/publication/363591821_KOLABORASI_TRIPLE_HELIX_DALAM_PENANGGULANGAN_BENCANA_TANAH_LONGSOR_DI_KABUPATEN_BUTON

Pradana, F. (2018). Efektivitas Penanggulangan Risiko Bencana Alam Melalui Pendekatan Kolaboratif di Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul. Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/160601>

Malyani, Tri, Dadang Masyur. (2019). *Collaborative Governance* dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. Jurnal Kebijakan Publik Vol.10 No.2, 59-119
<https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/7870>

Ansell, C, Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory. Vol. 18 No. 4, 543-571
http://marphli.pbworks.com/w/file/attach/55667103/Collaborative_governance_theory.pdf

Irawan Umabaihi, Hendra, Nurliah Nurdin, Romli Arsyad. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula. Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol.4 No.6
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9936/7647>

Widyaningsih, Herlina Wahyu Tri. (2020). Manajemen Kolaboratif Dalam Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Banjarnegara. Public Policy And Management Inquiry. Vol.4 issue 2, 116-133
<https://jos.unsoed.ac.id/index.php/ppmi/article/view/3202/2063>

Rusmawan, Teddy, Supardi Hamid, Joko Santoso. (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Karangbawang

Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/9507/pdf>

